

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran 2

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2018

MODUL PEMBELAJARAN 2

HAKIKAT, URGENSI, HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian kedua ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan memahami hakikat dan urgensi eksistensi pengetahuan (*knowledge*) pendidikan kewarganegaraan agar diimplementasikan secara baik yang tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari: bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap negara di planet bumi ini pasti mengharapkan warga negara atau bangsanya menjadi manusia yang cinta pada bangsa dan negara. Ini sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Pribahasa Minangkabau “*Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*” mengandung makna bahwa jika seseorang berada di suatu tempat atau negara, maka sebagai insan warga negara wajib membela, memahami, menyayangi, mencintai, menjaga, mengasihi, mengabdikan untuk negara tempat tinggalnya dan tidak berperilaku kontra produktif apalagi berkhianat.

Apa yang diutarakan di atas hanya menunjukkan bahwa hakikat manusia secara fitria memang harus dilakukan secara penuh kesadaran (*conditio sine quanon*), dengan bijak dilakukan seperti air mengalir begitu pula dengan hakikat-hakikat yang lain. Seperti dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, memiliki hakikat yang harus dimengerti dan dipahami agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran tentang ke-Indonesia-an, untuk membentuk keperibadian, membangun berkarakter kebangsaan, berani bela negara, cinta tanah air dan berwawasan nasional, sehingga menjadi **warga negara** yang baik dan pintar (*smart dan good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pembelajaran ke-Indonesia-an yang dimaksud adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik pendidikan tinggi dalam membina mahasiswa dan pemuda agar benar-benar menjadi orang Indonesia. Pertanyaan mendasar adalah: apakah selama ini orang Indonesia belum menjadi bangsa

Indonesia? Jawabannya tidak. Semua warga negara Indonesia sudah menjadi bangsa Indonesia yang sah dan memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo (2016), jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa. BPS tahun 2010 mempublikasikan hasil pencacahannya dimana terdapat 1.340 suku bangsa (etnik) yang mendiami bumi nusantara yang tersebar di 17.504 pulau besar dan kecil dan memiliki 1.211 bahasa daerah. Jadi semua penduduk, asal etnik dan bahasa daerah yang dimiliki yang mendiami pulau-pulau nusantara adalah bangsa Indonesia.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat bertahan hidup (survival), mampu menghadapi tantangan abad ke-21 yang serba menuntut keterbukaan dan kecakapan untuk bisa menjadi sejahtera, aman dan damai. Pengaruh euforia reformasi membuat bangsa Indonesia hampir-hampir lupa diri bahwa sesungguhnya mereka adalah bangsa Indonesia. Boleh jadi seseorang sah sebagai warga negara Indonesia, namun orientasi cara berpikir, wawasan, sikap dan tidakannya jauh dari nilai-nilai kebangsaan, apa lagi cinta tanah air Indonesia. Pengetahuan, sikap dan perilaku sudah tergerus oleh hadirnya perkembangan situasi dan kondisi perorangan dan/atau kelompok yang saling memojokkan, membeci, menghasut, memfitnah, mengintimidasi dan mengutamakan konflik kepentingan yang dihebuskan oleh provokasi media sosial secara langsung atau tidak, dengan dalil dan berlindung pada tatanan demokrasi. Demikian juga semakin menguatnya arus globalisasi dan hegemoni negara-negara kuat yang masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung. Semua faktor tersebut telah membuat bangsa Indonesia hampir kehilangan orientasi, oleh sebab itu pelan tapi pasti sangat perlu meng-Indonesia-kan bangsa Indonesia.

Dalam konteks bangsa Indonesia sudah memasuki abad ke-21 pada era milenium ke-3 yang berada atau bermukim di negara kepulauan (*archipelago*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tataran teori negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*), Indonesia memiliki bangsa sebagai warga negara (*citizen, citoyen*) berarti warga (*member*) dari suatu negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam bahasa Belanda disebut *staatsburger* atau *onderdaan* atau kawula negara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *civic, citizen* atau *civicus*.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga negara Indonesia adalah semua penduduk yang berada di wilayah negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Misalkan: petani, pedagang, PNS, Polisi, TNI, Karyawan, Guru, Dosen, Mahasiswa dan yang lainnya.

B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting (urgent) bagi bangsa Indoensia? Sebelum diuraikan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, ada baiknya kita melirik negara-negara lain tentang komintmen dan konsistensinya dalam memberikan pemahaman (*guiding principle*) bagi warga negaranya tentang nilai-nilai, filosofi negara dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Jika di Indonesia bernama Pendidikan Kewarganegaraan, maka di Amrika Serika (USA) *Civics*, *Civic Education*, di Inggris (*United Kingdom*), *Citizenship Education*, di Timur Tengah, *Ta'limatul Muawwatanah*, *Tarbiyatul Watoniyah*, di Mexico *Educacion Civicas*, di Jerman, *Sachunterricht*, di Afrika Selatan, *Life Orientation*, di Rusia, *Obscesvovedinie*, di Malaysia, *Pendidikan Sivik*, dan tentunya di setiap negara pasti ada pembelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan ini.

Terkadung maksud bahwa setaip negara menginginkan dan mempunyai *ekspektasi* agar semua warga negara memahami filosofi, mengetahui sejarah bangsa, menjadi cinta bangsa dan negara serta menjadi cerdas dalam membela negaranya. Nah, tentu para *fouding fathers*, *stakeholders* dan seluruh bangsa Indonesia mempunyai hal yang sama, yaitu agar harkat, martabat, identitas, integritas dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tetap terjamin, NKRI harga mati.

Apa yang diutarakan di atas sangat relevan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara harfiah **pendidikan kewaganegaraan** adalah sebagai program pembelajaran yang menginginkan dan mempunyai *ekspektasi* dapat membentuk manusia Indonesia memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Dari pengertian ini, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam pembelajarannya. Oleh sebab itu, adalah sangat wajar dan dipandang urgen bagi setiap mahasiswa untuk menempuh mata kualiah pendidikan kewarganegaraan, sebagai prasyrat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Jika menilik maksud pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu proses pembentukan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Merupakan implementasi dari UUD NRI 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12/2012, tentang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana pada Kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, maka secara yuridis formal urgensi pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai amanat yang harus sampai kepada setiap warga negara Indonesia.

Dari maksud pembelajaran tersebut, tentu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan yang spesifik yang harus

dicapai karena sekaligus sebagai *outcome* yang diharapkan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara Indonesia menjadi bersikap dan berperilaku baik dan pintar (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945. Ini tujuan yang sangat bagus, sebab mau kemana dan akan sampai dimana, tentu tergantung tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan tentu ada beberapa langkah, cara, pendekatan, metode dan teknik dalam proses pembelajarannya. Ikhwal proses penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran dalam pencapaian tujuan sudah diutarakan pada bagian pendahuluan.

C. Historis, Sosiologis dan Politis

1. Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Supaya tidak tumpang tindih dengan pembahasan sejarah perjalanan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada bagian terdahulu, maka pembahasan historis pendidikan kewarganegaraan pada bagian ini memfokuskan pada hakikat atau esensi pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dan pendidikan bela negara yang cinta tanah air Indonesia.

a. Zaman Kerajaan dan Penjajahan

1.1. Kerajaan Sriwijaya

Pada zaman kerajaan Sriwijaya, di abad VII, dibawah Wangsa Syailendra (600-1400), nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan sudah mulai diinisiasi oleh Sriwijaya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebagai suatu negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi Wawasan Nusantara yang kita kenal dewasa ini. Kerajaan Sriwijaya telah mampu menyatukan wilayah nusantara yang terdiri dari pulau-pulau menjadi satu kesatuan yang kuat (terintegrasi), meskipun ada perbedaan suku bangsa, bahasa daerah dan adat istiadat namun sudah dapat dipersatukan dalam konsepsi kemaritiman. Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi wilayah Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu yang terkenal sebagai pusat perdagangan, sehingga rakyat makmur dan sejahtera.

Masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 600-an – 1100-an atau dimulai abad VII, Raja pertama dipimpin oleh Daputra Hyang Sri Jayanasa, dengan lokasi kerajaan berdasarkan prasasti Kedudukan Bukit di Palembang (682), Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat berbasis maritim di Pulau Sumatra. Sedangkan menurut catatan perjalanan I-Tsing seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Bahasa

yang digunakan adalah melayu kuno dengan huruf *pallawa*, beragama Budha dengan mata uang koin emas dan perak.

Pada tahun 686 Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda dan di tahun 775 menguasai Selat Malaka. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya pada abad IX - X Masehi, dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya digambarkan sudah berdaulat di wilayah nusantara dan memiliki kemakmuran, dimana rakyat aman dan sejahtera. Ada beberapa hal yang dapat dipedomani dari keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dan rakyatnya dalam usaha mempertahankan kedaulatan, yang bila dikaji secara mendalam akan memperoleh gambaran bahwa ikhwal tersebut sama persis dengan upaya-upaya melaksanakan hak dan kewajiban **bela negara**, sebagai berikut:

Dalam **bidang perdagangan** telah diatur dengan baik, dimana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat. Dengan demikian rakyat mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produksi. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pengendali rute perdagangan di perairan lokal yang mengenakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat di Selat Malaka dan Selat Sunda. Untuk lebih meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, Sriwijaya mengendalikan jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India.

Semangat bela negara terlihat nyata pada usaha-usaha yang dilakukan Sriwijaya dalam hal mencintai produksi lokal baik dalam bentuk kerajinan, maupun hasil-hasil bumi dalam negeri. Begitu pula dengan kemampuan Sriwijaya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah nusantara, hingga dapat menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara diantaranya: Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina.

Dalam **bidang pemerintahan** Kerajaan Sriwijaya sudah mengangkat pegawai kerajaan yang mengurus pajak harta benda kerajaan, ada pula pegawai yang melaksanakan urusan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan ada rohaniawan yang bertugas menjadi pengawas teknis dalam pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sudah ada keterpaduan antara urusan pemerintahan dengan agama, yang menunjukkan keterkaitan sistem negara dengan nilai-nilai Ketuhanan. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara sudah tercermin di Kerajaan Sriwijaya, seperti yang diabadikan cita-cita negara Sriwijaya "*marvuat vannua Criwijaya siddhayatra subhiksa*" artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur.

Di bidang pemerintahan didapati adanya kontribusi konsep bela negara yang hakiki dalam suatu negara. Hal ini tampak jelas pada sistem pemerintahan, dimana sudah ada pegawai kerajaan yang bekerja dibagi menjadi kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi secara spesifik. Keberadaan para pegawai atau petugas di bidang pajak, keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan pengawasan, menunjukkan bahwa sudah ada sistem kerja yang profesional yang dilakukan para pegawai Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berarti, pada zaman Sriwijaya sudah ada tekad melaksanakan hak dan kewajiban bela negara.

Dalam **bidang pendidikan**, pada zaman Kerajaan Sriwijaya sudah didirikan Universitas Agama Budha yang sangat terkenal di Asia. Para pengajar di universitas ini umumnya berasal dari Kerajaan Sriwijaya, tetapi ada pula guru-guru tamu yang didatangkan dari India, antara lain: Dharmakirti. Para pelajar yang sudah ditamatkan dari Universitas Agama Budha bisa melanjutkan belajar ke India. Sudah menjadi tesah bahwa pendidikan menjadikan bangsa cerdas. Rakyat yang cerdas dapat membangun bangsa dan negaranya menjadi berkembang dan maju. Pada zaman Sriwijaya sudah banyak rakyat yang cerdas karena mereka belajar di Universitas Budha. Ini artinya bahwa rakyat Sriwijaya sudah memiliki pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) tertentu khususnya Agama Budha. Rakyat cerdas yang dilandasi dengan nilai-nilai moral ketuhanan dan ideologi suatu negara, pasti cerdas pula dalam membela negaranya.

1.2. Kerajaan Majapahit

Pada Abad XIII berdiri kerajaan Majapahit yang masa kekuasaannya tahun 1293-1527. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang memerintah sejak tahun 1293 sampai tahun 1309. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya (Papua). Zaman keemasan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan maha patih Gajah Mada. Letak Kerajaan Majapahit berpusat di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu kota di wilayah sekarang bernama Trowulan Kabupaten Kediri. Bahasa yang digunakan adalah Jawa Kuno dan Sansekerta, agama Siwa-Budha (Hindu dan Budha), Kejawean dan Animisme, dengan mata uang koin emas dan perak, kepeng (koin perunggu yang diimpor dari Tiongkok). Majapahit memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan dan Vietnam bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Persahabatan dengan negara tetangga atas dasar "*Mitreka Satata*."

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada isinya : "Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum bisa menyatukan nusantara". Pada

bagian lain Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331 berisikan cita-cita untuk mempersatukan wilayah nusantara raya. Berbunyi : “Saya baru berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.”

Tergambar dari semangat sumpah palapa bahwa sebenarnya pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit cukup banyak ancaman bagi wilayah kekuasaan Majapahit. Dari dalam timbul beberapa pemberontakan yang mau meruntuhkan kerajaan, juga dilancarkan beberapa strategi penyusupan untuk melemahkan kerajaan Majapahit. Pada masa ini juga sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil di wilayah nusantara yang saling perang (perang saudara) menjadi ancaman tersendiri bagi Majapahit. Namun dengan sistem pertahanan yang dibangun Patih Gajah Mada, pasukan-pasukan yang menyusup dan yang melancarkan serangan ternyata dapat dipatahkan. Begitu pula dengan ancaman yang datang dari luar wilayah kekuasaan, baik yang dilancarkan dengan taktik perdagangan maupun dengan strategi infiltrasi, semua dapat ditangkal oleh pertahanan dan sistem pemerintahan kerajaan yang tangguh.

Untuk menyatukan perbedaan dan keanekaragaman suku bangsa yang tergabung dalam wilayah kekuasaan Majapahit, dipergunakan seloka nasional karangan Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Sloka persatuan nasional yang terkenal itu berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua* artinya walaupun berbeda-beda, namun satu juga dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini tampak dengan jelas menunjukkan bahwa pada zaman itu sudah menerapkan strategi persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan negara. Persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan kesatuan dalam berbagai pandangan menjadi satu kekuatan besar dalam mempertahankan wilayah nusantara.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik, pemerintah kerajaan Majapahit mengangkat para penasehat kerajaan yang berfungsi memberikan nasihat dan memberikan pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan. Seperti, *Rakryan I Hino I, Sirikan dan I Halu* yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Terdapat kehidupan yang rukun dan gotong royong yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sistem yang baik ini, meskipun pemerintahan menggunakan asas monarki, namun kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat ditumbuhkan adat dan adab bermusyawarah untuk mufakat, terutama dalam mengambil keputusan bersama secara bijak.

Menurut catatan sejarah masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, merupakan dua kerajaan besar yang telah mampu

melaksanakan pemerintahan yang baik, yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Dengan demikian berarti embrio bela negara sudah ada pada masa itu dan semangat bela negara makin realistis manakala kedua kerajaan ini berjuang habis-habisan demi terbentuknya wilayah nusantara sebagai cikal bakal wilayah NKRI.

1.3. Zaman Penjajahan

Masa penjajahan merupakan suatu masa yang sangat kelam. Nilai-nilai persatuan, rasa kebangsaan, nasionalisme dan semangat kejuangan yang sudah diletakkan secara historis oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sirnah adanya. Bukan berarti tidak ada semangat dan gelora bela negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan yang bersemayam dalam dada, tetapi kondisi yang dijajah menyebabkan tidak dapat dilaksanakan.

Keberadaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara tidak dapat bertahan lama dan runtuh satu persatu akibat dari perang saudara maupun pengkhianatan dari dalam tubuh kerajaan. Diperparah lagi dengan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan diantara kerajaan-kerajaan yang bernaung di wilayah nusantara, karena masing-masing kerajaan ada keinginan yang besar untuk mewujudkan ambisi menguasai kerajaan-kerajaan lain. Kondisi perang saudara dan pengkhianatan seperti ini berlangsung terus menerus dan berkesinambungan sejak adanya kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara, hingga kedatangan bangsa Eropa pada abad XVI sampai menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

1. Perjuangan Fisik

Seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit akibat perselisihan dan perang saudara, datanglah bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya kedatangan bangsa Eropa seperti: Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda hanyalah untuk membeli rempah-rempah yang dibutuhkan negaranya. Kemudian, mengingat Indonesia merupakan negara makmur yang sangat subur dan penghasil rempah-rempah, serta hasil bumi maka bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Sejalan dengan misi penguasaan perdagangan, bangsa Barat merasa lebih strategis kalau bercokol dan berkuasa. Akhirnya, mereka merubah strategi menjadi menguasai. Sejak itu lembaran hitam penjajahan mulai terjadi.

Penjajahan Belanda memusnahkan kedaulatan negara yang telah dibangun Sriwijaya dan Majapahit, menghancurkan persatuan bangsa yang terkenal dengan politik - *divide et impera* - pecah bela kuasa, dan melenyapkan kemakmuran karena segala kekayaan hasil bumi diraup penjajah dan dibawa ke negeri Belanda. Pendek kata seluruh wilayah diinjak-injak bangsa penjajah dan semua kerajaan yang ada ditaklukan serta dikuasai agar mampu bercokol dan melakukan kolonisasi yang lebih luas sampai ke seluruh wilayah nusantara dikuasai penjajah Belanda. Meski raja-raja melakukan perlawanan, namun kondisi pahlawan yang dilancarkan sangat tidak berimbang dan tidak sebanding. Bangsa Belanda menggunakan senjata api dan senjata meriam untuk meluluhlantahkan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan Bambu Runcing dan persenjataan seadanya. Tak pelak lagi, Belanda menang dan menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang kalah yang berada di seluruh wilayah nusantara.

Tercatat banyak kerajaan dan para Pahlawan Bangsa yang berjuang gigih melawan penjajah. Misalnya pada abad XVI hampir bersamaan bangsa Eropa ke Indonesia, berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, tetapi tetap tidak mampu membendung masuknya bangsa penjajah. Pada abad XVII dan XVIII dengan semangat patriotik yang tinggi tampil pejuang bangsa dengan gigih melawan penjajah seperti yang dilancarkan pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Agung Tirta Yasa dan Ki Tapa (Banten 1650), Hasanuddi (Makasar 1660), Iskandar Muda (Aceh 1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670), Ibnu Iskandar (Minang Kabau 1680), dan yang lainnya.

Nasionalisme bangsa Indonesia tidak pernah surut dan padam, meski penjajah Belanda makin keras melakukan penindasan. Terbukti pada awal abad XIX penjajah Belanda merubah sistem kolonisasi, yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang lazim lebih dikenal dengan VOC berganti dengan Badan Pemerintah Resmi yaitu: Pemerintahan Hindia Belanda. Pada sistem kolonialisasi Hindia Belanda ini, makin jelas bahwa penjajah Belanda tidak akan memberikan kesempatan kepada pahlawan bangsa untuk memenangkan dalam setiap melancarkan pemberontakan. Sistem kolonisasi ini dibangun dengan strategi yang melemahkan para pejuang bangsa dalam melakukan serangan. Selain dilengkapi dengan persenjataan tergolong mutakhir pada saat itu, para penjajah Belanda sudah menguasai ilmu pengetahuan yang lebih maju dibandingkan nenek moyang kita.

Perlawanan fisik tetap terjadi, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah terbukti serangan demi serangan dilancarkan pahlawan

bangsa. Perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan para pahlawan Indonesia, seperti Patimura di Maluku (1817), Imam Bonjol di Minangkabau (1822-1837), Diponegoro di Mataram (1825-1830), Badaruddin di Palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, Cut Nya' Din di Aceh (1873-1904), dan Sisingamangaraja di daerah Batak (1900). Perlawanan-perlawanan terhadap penjajah ini dilakukan secara sendiri-sendiri di setiap daerah, tidak ada koordinasi satu dengan yang lain serta belum ada persatuan dan kesatuan visi dalam melawan penjajah Belanda. Pada akhirnya perlawanan fisik yang dilakukan oleh pejuang bangsa tidak dapat berhasil mengalahkan penjajah Belanda, sebaliknya semakin menguatkan dan memperkokoh kedudukan penjajah Belanda di bumi nusantara, yang berkuasa selama lebih kurang 3,5 abad.

2. Perjuangan Non Fisik

Mempelajari pengalaman kekalahan-kekalahan masa lalu yang dilakukan dengan gerakan fisik dan seiring telah ada beberapa putra bangsa Indonesia yang berpendidikan, maka pada permulaan abad XX para putra bangsa Indonesia mulai mengadakan perubahan cara dan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perjuangan ditandai dengan semangat nasionalisme dengan membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara bersama, membangun komunikasi dan koordinasi dalam setiap tindak pergerakan perjuangan melawan penjajah.

Kebangkitan Nasional

Perjuangan non fisik dilakukan dengan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, tidak bersifat politik. Perintis perjuangan non fisik ini dipelopori oleh Boedi Oetomo (*Ejaan Van Ophuijsen*) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, dengan tokoh yang terkenal bernama dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada tokoh lain Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Para pemuda bangsa yang tergabung dalam organisasi ini adalah para mahasiswa *Stovia* dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai perjuangan dengan merintis jalan baru ke arah tercapainya tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya Douwes Dekker seorang tokoh Indo-Belanda mencoba mempopulerkan pergerakan ini dan dengan terus terang mengatakan bahwa perlu mewujudkan aktivitas “politik” dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, maka pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin

diterima dan masuk dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Perubahan *image* perjuangan dari pendidikan dan sosial ke arah pergerakan politik, membawa konsekuensi pada perubahan cara pandang para pemuda dalam menetapkan arah perjuangan. Oleh sebab itu, masa perjuangan Boedi Oetomo ini merupakan tonggak awal perjuangan bela negara non fisik yang terkenal dengan nama **kebangkitan bangsa**.

Setelah itu bermunculan pergerakan-pergerakan bela negara non fisik, antara lain muncul Serikat Dagang Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar dan kecil di Solo untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Oleh Tjokroaminoto nama Serikat Dangan Islam diganti dengan nama Serikat Islam, dengan tujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidup tertindas oleh penjajah. Munculnya pergerakan yang bernuansa politik, menyebabkan Boedi Oetomo agak terdesak ke belakang. Sehingga kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Serikat Islam dan *Indische Partij*. Dengan gerakan baru dalam bidang politik ini, maka Serikat Islam makin eksis dalam **bela negara** yaitu dengan memberikan pengertian dan menanamkan kesadaran nasionalisme Indonesia serta patriotisme di kalangan masyarakat luas.

Dengan makin kuatnya jiwa kebangsaan Indonesia terpatri dalam semangat pemuda bangsa Indonesia, maka tatkala Belanda meminta uang kepada bangsa Indonesia dalam perayaan hari ulangan tahun negara Belanda, timbul kemarahan dari para pejuang bangsa, sehingga mendorong Soewardi Soeryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara menulis sebuah artikel berjudul *Als ik Nederlander Was* (Sendainya Saya Seorang Belanda). Mengingat tulisan ini merupakan sindiran keras terhadap penjajah Belanda, maka dirinya bersama dua temanya Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun para tokoh pergerakan kebangkitan bangsa dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun pergerakan dan perjuangan **bela negara** menuju kemerdekaan Indonesia tidaklah kendur dan surut. Malahan nasionalisme Indonesia semakin menguat dikalangan pemuda, mengingat dari pembelajaran perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh Boedi Oetomo memberikan kontribusi pemikiran yang amat berguna dalam melakukan perlawanan secara non fisik kepada pemerintah Hindia Belanda, yang tidak lain adalah penjajah Belanda. Hal ini mendorong Soekarno dan kawan-kawan memelopori berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Pergerakan politik

untuk mencapai perjuangan kemerdekaan semakin dipertajam, dengan menanamkan nasionalisme Indonesia, yang tidak lain adalah sebagai semangat perjuangan bercorak aktivitas politik yang nyata dalam mewujudkan persatuan bangsa.

Sumpah Pemuda

Embrio pergerakan melawan penjajah Pemerintah Hindia Belanda dengan memupuk rasa persatuan dan bangsa dalam **membela negara** pada dasarnya sudah tertanam semenjak pergerakan Boedi Oetomo dan pergerakan-pergerakan lainnya di era sebelum tahun 1928. Perjuangan ke arah kemerdekaan yang dipelopori oleh para pelajar pemuda Indonesia, yang terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah dalam wilayah nusantara, tampaknya makin jelas dan tegas untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Soegondo Djojopoespito (Ketua PPI), Mr. Muh. Yamin (*Jong Sumateranen Bond*), Senduk (*Jong Cilebes*) dan yang lainnya yang mewakili daerah, seperti *Jong Java*, *Jong Sumateranen Bond*, *Jong Batak*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Ambon*, dan *Jong Cilebes*. Juga hadir pengamat dari pemuda Tiong Hoa seperti : Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda, yang hasilnya adalah menyepakati ikrar suci Seumpah Pemoeda, yang berisi pengakuan adanya Bangsa, Tanah Air dan Bahasa satu yaitu Bahasa Indonesia.

Eksistensi kongres Sumpah Pemuda telah memberikan kemajuan dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses persatuan makin kuat, perjuangan **bela negara** tidak dilakukan secara sporadis lagi, seperti halnya pada masa-masa lalu. Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai titik awal adanya kebersamaan (integrasi masyarakat) yang berasal dari berbagai suku bangsa yang berada dalam wilayah nusantara ini. Persatuan ini membuat Pemerintah Hindia Belanda semakin mengalami tekanan politik didesak untuk memberikan pengakuan atas keberadaan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Semangat nasionalisme makin meningkat, karena sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai suatu bentuk kristalisasi semangat **bela negara** untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Perjuangan Bela Negara Zaman Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 bangsa Jepang masuk ke Indonesia, menerima penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang di Kali Jati Jawa Tengah. Setelah sebelumnya pada tanggal 7 Desember 1941 meletus Perang Pasifik dimana Jepang mampu meluluhlantakkan Pearl Harbour dengan mengebomnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Jepang telah menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di Asia Pasifik.

Tipu muslihat Jepang mempropagandakan untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia jauh dari kenyataan. Jepang justru secara terang-terangan menindas bangsa Indonesia dengan keji dan kejam. Mencermati kekejaman penjajahan Jepang, para pejuang bangsa dengan patriotis yang tinggi secara bahu membahu melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Jepang terjadi dimana-mana dalam wilayah nusantara. Beberapa perlawanan yang dilakukan para pejuang merupakan gerakan **bela negara** untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajahan Jepang.

Beberapa bentuk perlawanan bela negara terhadap penjajahan Jepang, antara lain : perlawanan dengan menggunakan strategi kooperatif atau kerjasama, perlawanan dengan strategi gerakan bawah tanah (illegal), dan perlawanan bersenjata secara fisik terjadi dimana-mana. Perlawanan **bela negara non fisik** yang paling menonjol adalah perlawanan dengan menggunakan strategi Kerjasama (Kooperatif). Para pejuang yang sudah banyak belajar dari pengalaman kekalahan dalam perlawanan bela negara menggunakan strategi fisik dan pemberontakan, lalu memanfaatkan sebaik mungkin organisasi-organisasi sebagai pengikat persatuan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia.

Memang, Jepang hanya mengakui organisasi-organisasi yang dibentuknya saja yang ditujukan untuk kemenangan perang Asia Pasifik. Sebaliknya melarang semua organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh para pejuang, pemuda dan pelajar Indonesia. Namun, tidak kalah pintarnya, dimana tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu sebagai alat perjuangan bela negara, yaitu dengan cara menggembelng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia **bela negara** melawan penjajah Jepang adalah dengan melakukan kerjasama (kooperatif) dari organisasi-organisasi bentukan Jepang. Organisasi-organisasi yang dimanfaatkan untuk melawan penjajah Jepang secara non fisik tersebut adalah Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Himpunan Kebaktian

Jawa (*Jawa Hokokai*), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, Badan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi In*), dan BPUPKI serta PPKI. Kecerdasan bangsa Indonesia pada saat itu, terbukti dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang, telah berhasil menyusun UUD dan Dasar Negara sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.

2. Politis Pendidikan Kewarganegaraan

a. Awal Kemerdekaan (Orde Lama)

Pada masa ini, secara tersirat aktivitas pembelajaran pendidikan bela negara lebih banyak berorientasi pembentukan karakter kebangsaan melalui aktivitas sosial kultural dapat dikatakan sebagai babak baru dalam mengisi ruang-ruang kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masih sangat rawan dan tidak stabil. Dalam bidang politik dan keamanan terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, yaitu dengan datangnya kembali Belanda membonceng tentara Sekutu melalui *Nederlandsch Indie Civil Administratie*. Tentara Sekutu melakukan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang sehingga menimbulkan bentrokan bersenjata. Dalam bidang ekonomi, kondisi perekonomian sangat parah. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi dan berhasil menghapus autarki lokal warisan Jepang kemudian menggantikannya dengan sistem sentralisasi. Pada bidang sosial budaya terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan adanya penghapusan diskriminasi, yang memberlakukan penghapusan semua perbedaan perlakuan berdasarkan ras (warna kulit), keturunan, agama dan kepercayaan yang dianut warganya.

Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu dan mengemban misi melucuti senjata dan memulangkan para *interniran*. Pada hakikatnya Belanda ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia melalui "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda" atau lebih terkenal dengan istilah *Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA)*. Belanda yang membonceng tentara Sekutu tiba kembali pada tanggal 29 September 1945. Sangat jelas tujuannya untuk menjajah Indonesia kembali. Kondisi makin parah lagi, ternyata para tentara Sekutu juga membantu Belanda yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Melihat kenyataan itu, rakyat Indonesia tidak ingin lagi membiarkan Indonesia menjadi ladang penjajahan Belanda, maka secara bahu membahu bangkitlah perlawanan **membela negara** bangsa dan Indonesia melawan tentara Sekutu dan NICA. Rakyat Indonesia hanya menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang dimilikinya.

Setelah berhasil memukul mundur para tentara Sekutu dan NICA keluar dari wilayah Indonesia, masalah keamanan dalam negeri masih belum stabil. Timbul konflik dan ancaman pemberontakan dimana-mana sehingga menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan agar TNI melakukan perlawanan yang menentukan dalam rangka mengamankan kondisi tanah air dari gangguan keamanan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Misalnya Peristiwa Madiun (18 September 1948) dimana aliran kiri Moeso yang baru kembali dari Moskow merebut Madiun dan memproklamasikan “Sovyet Republik Indonesia”, Pemberontakan Kartosuwiryo (19 September 1948) yang dilakukan oleh pasukan Darul Islam di Jawa Barat, peristiwa Angkatan Perang Ratu Adi (APRA) di Bandung (23 Januari 1950) dibawah pimpinan Westerling memberontak kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), peristiwa Andi Azis di Ujung Pandang (5 April 1950) sebagai bekas tentara KNIL memberontak kepada RIS, peristiwa RMS di Maluku (1 Nopember 1950) dibawah pimpinan Soumokil memberontak kepada RIS, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1949), pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah (1949-1962) dibawah pimpinan Karosuwiryo berencana membentuk negara Islam Indonesia, pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan (1957) dibawah pimpinan Kahar Muzakar, pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh, gerombolan Merapi Merbabu Complek (MMC) memberontak kepada RI, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sulawesi(1958-1961), pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) melakukan pemberontakan di Sulawesi (1958-1961), hingga pemberontakan G30S/PKI 30 September 1965 yang dilakukan oleh kelompok Dewan Revolusi Indonesia dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. PKI beserta ormas-ormasnya ; Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIM), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Semua pemberontakan ini membuat situasi keamanan, politik, ekonomi dan sosial menjadi tidak stabil dan mengalami *stagnan* dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Dalam kondisi yang carut marut tersebut, Presiden Soekarno juga mengemukakan perlu adanya konsep pembangunan mental sebagai bentuk perjuangan **membela negara** non fisik, untuk mengimbangi pembangunan fisik material, maka Soekarno menyampaikan konsep yang lebih dikenal dengan nama Trisakti dalam membangun negara Indonesia. Menurut Soekarno, membangun suatu negara tidak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun

sesungguhnya juga membangun jiwa bangsa. Bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak harus memiliki tiga hal, yaitu berdaulat (1) di bidang politik, (2) berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dibidang ekonomi, dan (3) berkepribadian di bidang kebudayaan. Pemikiran ini, lazim di sebut konsep Trisakti.

Embrio pembangunan karakter bangsa (*character building*) sesungguhnya berasal dari pemikiran Soekarno tentang konsep Trisakti itu. Dengan memahami konsep Triskati, bangsa Indonesia dapat berkerjasama dengan bangsa internasional yang memiliki identitas dan harga diri serta menghormati kedaulatan masing-masing. Memang menurut Soekarno, tidaklah mudah membangun karakter bangsa Indonesia, sebab masyarakat Indonesia saat itu baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Hal ini membuat bangsa Indonesia (saat itu) sudah terbiasa dengan mental rendah sebagai “bangsa kuli” diantara bangsa-bangsa lainnya. Akibat perjuangan melawan Belanda dan penjajahan Jepang, membuat banyak sekali kerusakan material, mental, serta moral. Untuk memperbaiki kerusakan mental dan moral lebih sukar dari pada memperbaiki kerusakan material.

Pembangunan moral dan mental yang lebih dikenal dengan nama pembangunan karakter bangsa, ditempuh dengan kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berhasil mengembalikan UUD 1945 secara murni yang mana di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai pedoman dasar dan pandangan hidup (*way of life*) dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teknis, Presiden Soekarno memberi tafsir sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul : “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN (Ali dalam Sarbaini dan Wahid, 2015 : 13).

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa yang banyak mengalami pengorbanan pada era orde lama memaknai bahwa, meskipun banyak sekali ancaman dan tantangan yang akan menghancurkan kemerdekaan dan kedaulatan namun tetap tidak bisa diruntuhkan. Negara Indonesia tetap berdiri kokok di atas persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralis. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu negara yang sudah lama dicita-citakan dan ketika proklamasi dikumandangkan, cita-cita kemerdekaan itu telah terwujud. Tinggal tergantung bagaimana

kemampuan dari bangsa Indonesia sendiri mempertahankan kemerdekaannya. Keberadaan para pejuang dan patriotis bangsa yang telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, di atas (1) keinginan Pemerintah Sipil Belanda atau *Nederlandsch Indie Civil Administratie* (NICA) yang membonceng tentara Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia dan (2) pemberontakan dan pergolakan dalam negeri yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat penjajahan, namun negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 tetap berdiri tegak *survival*.

Hal ini tidak terlepas dari adanya tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengingat pada masa itu sudah ada pembentukan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Agenda kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang menonjol disamping nilai dasar yang sudah ada adalah persatuan dan kesatuan, kedaulatan dan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Bung Karno berhasil mengangkat tinggi kehidupan kebangsaan yang terus hidup hingga saat ini.

b. Masa Orde Baru

Periode Orde Baru penanaman semangat bela negara dan cinta tanah air salah satunya adalah melalui pendidikan Kewiraan dan pementapan moral Pancasila melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Awal mula timbulnya masa orde baru adalah setelah pecahnya peristiwa G 30 S PKI.

Peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 PKI, menjadi akhir dari keberadaan zaman orde lama. Presiden Soekarno menandatangani **Surat Perintah Sebelas Maret** yang lazim disingkat **Supersemar**, pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi perintah untuk menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat Pangkopkamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.

Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS, sehingga lahirlah Ketetapan MPRS No. XXXIIMPRS/1967 yang isinya mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Lahirlah babak baru dan sejak itu, tonggak pemerintahan orde baru mulai dilaksanakan. Pada hakikatnya orde baru merupakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan di Trilogi Pembangunan yaitu: konsepsi pembangunan nasional yang dicanangkan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi Trilogi Pembangunan itu adalah :

- 1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa stabilitas nasional yang sehat dan dinamis perlu diprioritaskan, sebab kondisi negara yang aman dan tenteram merupakan modal dasar dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan akan dapat melaksanakan pembangunan nasional yang hasil-hasilnya dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Langkah ini ditempuh mengingat pengalaman masa lampau yang selalu bergolak. Di seluruh wilayah Indonesia terjadi pemberontakan, yang membuat rakyat selalu tidak aman dan tidak tenang dalam melaksanakan hajat hidupnya. Oleh sebab itu, pemikiran cerdas dari Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan pembangunan nasional.

Kebijakan nasional dengan menggunakan Trilogi Pembangunan merupakan langkah maju dalam **bela negara** pada pemerintahan orde baru. Sebab bela negara itu tidak mesti memanggul senjata melawan pemberontak, penjajah dan gerombolan yang mengancam eksistensi negara. Akan tetapi dengan melaksanakan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat merupakan suatu keniscayaan dari konsepsi bela negara. Dengan kondisi yang aman dan tertib akan banyak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikuti serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin berhasil pelaksanaan bela negara yang dilakukan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**.

Kondisi pembangunan makin stabil karena dalam melaksanakan pembangunan sudah ada haluan negara yang disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dalam pelaksanaannya ditempuh melalui strategi Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Dengan menganut pola pembangunan Jangka Pendek, Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang. Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang diharapkan dalam GBHN, maka pemerintah mengambil kebijakan sentralisasi pembangunan dengan model

bottom up dan *top down planning*. Meski pelaksanaan pembangunan lebih banyak dilakukan dengan strategi *top down*, namun masyarakat dapat mengusulkan pembangunan mulai dari bawah dengan strategi *bottom up* melalui loka karya di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk makin memantapkan ideologi negara Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka diambil kebijakan agar Pancasila menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut sejarahnya sejak awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto sudah bertekad untuk memperbaiki arah pemahaman Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Pada peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila” oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila harus dirumuskan kembali agar dapat diamalkan oleh bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, maka pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*). Pada pasal 4 menjelaskan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Dengan demikian maka Pancasila menjadi bagian yang sangat fundamental dalam pembangunan nasional negara Republik Indonesia.

Dengan mencermati konsepsi pelaksanaan pembangunan nasional di atas, maka ada dua model konsepsi **bela negara** yang sangat tajam yang dilaksanakan dalam masa pemerintahan orde baru, yaitu (1) melalui Trilogi Pembangunan, GBHN dan REPELITA dan (2) melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kedua model konsepsi bela negara ini, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi serta menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, masyarakat Indonesia dijamin dalam kondisi yang aman dan tertib, maka sejurus dengan itu perlu adanya modal dasar pembangunan berupa karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu dengan moral Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Kedua strategi ini menjadikan negara Indonesia menjadi negara Pembangunan yang aman, tenteram dan damai diatas kemerdekaan dan kedaulatannya sendiri. Tidak heran jika Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.

**c. Masa Transisi dan Reformasi
Presiden BJ. Habibie**

Transisi dan Reformasi menanamkan semangat bela negara, demokrasi dan revolusi mental. Masa transisi diawali pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Dalam waktu yang singkat Presiden BJ. Habibie telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang bebas KKN. Langkah-langkah yang diambil adalah sbb:

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, terdiri atas unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP dan PDI. Rapat kabinet pertama tanggal 25 Mei 1998 berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, merencanakan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyetujui masa jabatan presiden dua periode. Upaya ini mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat.
2. Perbaikan bidang Ekonomi
Agar Indonesia segera keluar dari krisis ekonomi, Presiden BJ. Habibie mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 2.1. Melakukan rekapitulasi perbankan.
 - 2.2. Merekonstruksi perekonomian nasional.
 - 2.3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp. 10.000,-
 - 2.4. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
 - 2.5. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan IMF.
3. Melakukan reformasi di bidang politik
Beberapa langkah yang dilakukan dalam reformasi di bidang politik adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membentuk partai serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif. Kemudian membebaskan narapidana politik seperti: Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang memicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Presiden BJ. Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Amnesti pembebasan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dikukuhkan dalam Kepres No. 80 Tahun 1998.
4. Kebebasan menyampaikan pendapat
Presiden BJ. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di

Jakarta, dengan keluarnya Marzuki Darusman. Kemudian, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan satu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Berdemonstrasi. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Lalu Presiden BJ. Habibie mencabut UU No. II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Aksi Subversi dengan mengeluarkan UU No. 26 Tahun 1999.

5. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998.

Dalam rangka mengatasi krisis politik yang berkepanjangan, diadakanlah Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Untuk mengantisipasi pengerahan massa aksi demonstrasi pada sidang Istimewa MPR, maka selain dijaga keteta oleh pengamanan Polisi dan TNI, juga untuk pertama kali pengamanan Sidang Istimewa MPR melibatkan warga sipil yang dikenal dengan Pam Swakarsa, yang terdiri dari Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) dengan basis di Masjid Istiqlal, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Banser (GP Ansor), AMPI. FKPPi dan Kelompok Pendekar Banten. Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 Ketetapan, yaitu :

- Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No. 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Tata Tertib MPR.
- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum.
- Ketetapan MPR No. IX Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN.
- Ketetapan MPR No. X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998, Negara yang Bebas KKN.
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. XIV Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan Ketetapan MPR No. III Tahun 1998 tentang Pemilu.

- Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*).

Dari dua belas ketetapan MPR tersebut, terdapat empat ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu sebagai berikut:

- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum. Adanya ketetapan MPR ini, memungkinkan UUD 1945 di amandemen
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Maksimal Dua Periode.
- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*). Menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal, seluruh organisasi politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

6. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilu pertama setelah reformasi diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan Pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip *luber dan jurdil*. Pemilu diikuti 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.

Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh PDIP (Megawati Soekarno putri) yang memperoleh 33,76 % suara. Posisi kedua diduduki oleh Golkar dengan 22,46 % suara, PKN (K.H. Abdurrahman Wahid)

dengan 12,62 % suara, PPP dengan 10,71 % suara, PAN (Amin Rais) dengan 7,12 % suara. Sisa suara tersebar ke-43 partai lainnya. Hasil pemilu ini menunjukkan tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mutlak.

MPR yang terbentuk melalui mekanisme hasil Pemilu 1999 berhasil menetapkan GBHN, melakukan amandemen pertama UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 berhasil memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarno putri sebagai Wakil Presiden.

Masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie ini merupakan masa transisi dari pemerintahan Orde Baru yang otokratis kepada pemerintahan era reformasi yang demokrasi. Pada satu sisi secara historis BJ. Habibie berhasil mengadakan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan, antara lain dari sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang lebih demokratis. Namun pada sisi lain, atas berbagai desakan politik, ekonomi dan sosial dari berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri yang pro referendum Timor-Timur (provinsi ke-27 Republik Indonesia), hingga menyebabkan pada 30 Agustus 1999 dilakukan referendum yang di sponsori oleh PBB. Hasilnya bahwa mayoritas masyarakat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

Timor Timur menjadi bagian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1967 semenjak Portugis gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis (Timor Timur, sekarang Timor Leste), karena Portugis meninggalkan dan tidak pernah mengurus wilayah Timor Timur ini. Amerika dan Australia merestui Indonesia, karena takut Timor Timur menjadi kantong komunisme, karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxix-Komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS kalah dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Namun PBB tidak pernah menyetujui tindakan Indonesia.

Dari sudut pandang nasionalisme dan kepatriotisan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para pendukung pro referendum dari dalam negeri yang menghasilkan Timor Timur lepas dari Indonesia dan kemudian menjadi negara merdeka Timor Leste merupakan suatu kemunduran bila dilihat dari kaca mata semangat juang dalam **bela negara**. Meskipun pandangan internasional, terutama PBB menilai sikap Indonesia yang merestui referendum merupakan langkah maju untuk sebuah demokrasi. Tetapi sekali lagi bahwa Indonesia telah “kecolongan” dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari wilayah Indonesia, adalah karena lemahnya kondisi ketahanan Indonesia pada masa

transisi dalam mengatasi berbagai tekanan dan ancaman internasional.

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung sejak tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 23 Juli 2001, dengan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Sejarah mencatat bahwa K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Indonesia hasil Pemilu 1999. K.H. Abdurrahman Wahid dicalonkan sebagai Presiden oleh Poros Tengah, yaitu : Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang, proses pemilihan berjalan dengan demokratis dan transparan. Sehari setelah itu Megawati Soekarno putri terpilih sebagai Wakil Presiden.

Setelah resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, K.H. Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato pertamanya yang memuat tugas-tugas yang akan dilanjutkannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan rakyat
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Kabinet K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno putri disebut Kabinet Persatuan Indonesia, yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur ini banyak diwarnai oleh tindakan yang kontroversi, seperti :

1. Kabinet sering melakukan perubahan susunan (*reshuffle*)
2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri

Dalam pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membagi tugas yang menjadi kewenangan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri, sebagai berikut :

1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet
2. Menentukan fokus dan kebijakan pemerintah
3. Memimpin sidang kabinet
4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon satu

Dalam mengatasi krisis ekonomi negara. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tujuannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. DEN dipimpin oleh Prof. Dr. Emil Salim, anggota Anggito Abimayu, Sri Ningsih dan

Bambang Subianto. Dalam hal memenuhi amanat reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mulai melakukan langkah-langka reformasi, sebagai berikut :

1. Membubarkan Departemen Penerangan yang merupakan senjata utama rezim Soeharto masa Orde Baru dalam menguasai media.
2. Membubarkan Departemen Sosial yang korup.
3. Reformasi militer dengan mengeluarkan TNI dari ruang sosial-politik yang menjadi andalan pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, banyak sekali terjadi pertentangan dalam bidang politik, sosial budaya dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kontroversi yang diambil dalam menetapkan kebijakan pemerintahan, sehingga berdampak pada tidak stabilnya kondisi negara dalam melaksanakan amanat reformasi. Dalam kondisi negara yang tidak stabil itu, reformasi menjadi *kebablasan*, perubahan-perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan banyak yang jauh melenceng diluar amanat reformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada umumnya tanpa perencanaan, sehingga sulit dikontrol dan diukur dengan indikator yang jelas menurut barometer reformasi. Banyak opini yang menyatakan bahwa reformasi gagal dan tidak mencapai sasaran.

Kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversi itu antara lain: Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan agar TAP MPR No. XXIX/MPR/1966 yaitu melarang Marxisme dan Leninisme dicabut. Berusaha membuka hubungan dengan negara Israel. Tukang Pijit Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang \$4 juta, meskipun uang tersebut berhasil dikembalikan tetapi peristiwa ini sudah muncul ke permukaan sehingga masyarakat mengenalnya dengan istilah *Bulogate*. Bantuan Sultan Brunai \$2 juta untuk pemulihan Aceh gagal dipertanggung jawabkan, sehingga muncul skandal *Bruneigate*. Memperbolehkan bendera Bintang Kejora di Papua untuk dikibarkan asal berada di bawah Bendera Indonesia. Pemberlakuan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional yang diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.

Lalu Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan para Rektor Perguruan Tinggi se Indonesia pada tanggal 27 Januari 2001, pada saat itu Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal itu terjadi. Memberhentikan para Menteri Kabinet (*reshuffle*) yang bertentangan dengan kebijakannya. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi (1) Pembubaran MPR/DPR, (2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat Pemilu dalam waktu satu tahun

dan (3) Membekukan Partai Golkar. Namun Dekrit ini tidak mendapat dukungan. (<https://id.m.wikipedia.org>).

Dengan berbagai kebijakan yang kontroversi itu, membuat Presiden Abdurrahman Wahid banyak mendapatkan kritikan dan ditentang oleh berbagai pihak, para politisi dan masyarakat luas. Akhirnya sebanyak 151 anggota DPR telah menandatangani petisi meminta pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga pada tanggal 21 Juli 2001 dilaksanakan sidang istimewa MPR, menghasilkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001 yaitu secara resmi memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan Ketetapan MPR No. III Tahun 2001 yaitu menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Soekarno putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia.

Mencermati kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, memberikan pembelajaran yang kontroversi dengan semangat pembelajaran **bela negara**. Sehingga semangat pembelajaran bela negara mengalami distorsi dalam mencapai tujuan. Namun demikian, justru dalam situasi seperti itu akan membuat sebagian besar masyarakat yang cerdas bela negara makin peduli terhadap cita-cita negara. Sehingga gangguan dan ancaman apapun yang akan menghancurkan kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI, muncul semakin radikal dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menjamin tetap tegaknya NKRI yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Di sinilah diuji kesetiaan dan loyalitas anak bangsa dalam melaksanakan bela negara, agar NKRI tetap *survival*.

Presiden Megawati Soekarno putri

Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri berlangsung sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 20 Oktober 2004 dengan Wakil Presiden Hamzah Haz. Megawati Soekarno putri melanjutkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan dalam Sidang Istimewa MPR. Kabinet nya diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001, yang terkenal dengan nama Kabinet Gotong Royong. Program Kerja Kabinetnya, antara lain:

1. Mewujudkan otonomi yang tangguh
2. Menyehatkan Bank
3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri
4. Mewujudkan supremasi hukum.

Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami banyak persoalan dan dalam kondisi yang porak poranda, sebagai akibat beragam konflik yang memerlukan konsentrasi penuh untuk penyelesaiannya. Tercatat konflik komunal seperti Konflik di Ambon, Poso, Sampang

dan konflik politik sebagai efek domino dari adanya pemakzulan Gus Dur. Namun perlu dicatat, bahwa pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang dipandang sebagai salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan supremasi hukum, pada tahun 2003 Megawati Soekarno putri mendirikan Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang lazim disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, yaitu :

1. Meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
2. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan mengeluarkan UU Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
3. Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Pemberian perhatian khusus terhadap masalah ini, mengingat peristiwa lepasnya Timor- Timur dari NKRI.
4. Melanjutkan amandemen UUD 1945, dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
5. Meluruskan otonomi daerah, sebab dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi.

(apria3.blogspotspot.co.id)

Megawati Soekarno putri merupakan perempuan pertama Indonesia yang menjabat sebagai Presiden, tentu ini merupakan simbol kesetaraan gender dalam bidang politik. Berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan, namun dalam hal-hal tertentu Megawati Soekarno putri memiliki determinasi dalam kepemimpinannya. Misalkan mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Gaya kepemimpinan Megawati Soekarno putri yang anti kekerasan sangat tepat untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas pada kala itu.

Berbagai masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain perekonomian Indonesia masih terlilit utang warisan orde baru kepada IMF. Terjadi tuntutan dari daerah Aceh dan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, aksi terorisme di Kedutaan Besar Australia. Bom Bali I dan II, Atrium, Hotel Jw. Marriot. Dunia internasional ramai menyoroti masalah terorisme terutama Amerika Serikat,

proliferasi nuklir Irak dan Korea Utara, menguatkan dukungan Palestina untuk berdaulat. Sangat dilematis karena berbagai usaha diplomasi harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sementara tenaga diplomatik sangat terbatas dan masih kurang *capable* baik kabinet maupun Departemen Luar Negeri.

Ada beberapa kelebihan dari kepemimpinan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Menstabilkan fundamen ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar dan angka kemiskinan.
2. Mulai melakukan pemberantasan KKN dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya keberanian dengan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutejo) serta menangkap konglomerat bermasalah, Nurdin Halid.
3. Berhasil menyetatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998, terbukti dengan dibubarkan BPPN pada bulan Februari 2004 yang telah berhasil melaksanakan tugasnya.
4. Indonesia berhasil keluar dari IMF tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

Selain keunggulan tersebut, patut dicatat ada beberapa kelemahan dalam pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Kurang pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
2. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
3. Dipandang kurang berhasil dalam melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.

(wartasejarah.blogspot.co.id).

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pijakan pembelajaran **bela negara** yang kurang menguntungkan pada satu sisi, terutama terhadap beberapa kebijakan yang tidak populis dan kurang berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan harga BBM, penjualan BUMN ke tangan luar negeri dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari NKRI. Pada sisi lain terjadi pembelajaran **bela negara** yang begitu nasionalis, seperti kemampuan dalam mengatasi berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan keutuhan integrasi wilayah dengan mempertahankan Aceh dan Papua yang mau memisahkan diri dari wilayah NKRI, mengatasi krisis ekonomi dengan keluarnya Indonesia dari INF dan meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat dua periode dalam pemerintahannya. Periode pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2009 dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Periode kedua pada tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan Wakil Presiden Budiono.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)

Pada periode pertama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Misi yang dicanangkan:

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Kabinet SBY-JK dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 masa bakti sampai dengan 2009, dengan nama Kabinet Bersatu. Atas evaluasi kinerja kabinet, maka pada tanggal 5 Desember 2005 melakukan *reshuffle* perombakan kabinet yang pertama, kemudian pada tanggal 7 Mei 2007 dilakukan *reshuffle* perombakan kabinet kedua. Sampai akhir masa baktinya, tidak lagi dilakukan perombakan kabinet. Reshuffle bertujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet agar dapat mewujudkan visi dan misi yang diusung pemerintahan SBY-JK.

Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan nama program 100 hari kerja. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaaan agung. Langkah tersebut disambut baik masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan terhadap tersangka korupsi pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang dalam masa 100 hari kerja pemerintahan SBY-JK. (wartasejarah.blogspot.co.id).

Kepemimpinan SBY-JK mencoba menganut konsep Trias Politika. Dimana secara teoritis kekuasaan suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Secara umum ada tiga pembagian kekuasaan, yaitu legislatif lembaga pembuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang dan yudikatif lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi kepada lembaga-lembaga ataupun perorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Pelaksanaan konsep Trias Politika pada masa pemerintah SBY-JK mengalami perubahan progresif. Dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan **legislatif**, dan pilpres untuk memilih **eksekutif**, sekalipun **yudikatif** pemilihannya masih dilakukan oleh DPR melalui pertimbangan presiden.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan pemerintahan SBY-JK, al:

1. Dalam hal supremasi hukum, telah berhasil melakukan perang melawan korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang memiliki kewenangan luar biasa dalam menangani kasus hukum korupsi.
2. Dalam bidang integrasi bangsa, telah dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, menghasilkan situasi keamanan kondusif di Aceh dan yang lebih strategis lagi adalah Aceh tidak lepas, melainkan tetap dalam wilayah NKRI.
3. Kondisi politik di tanah air cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi, terutama dengan keberhasilan pilkada di Aceh menjadi prestasi tersendiri dalam pemerintahan SBY-JK

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pemerintahan SBY-JK adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
2. Masih rendahnya komitmen terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Misalnya: terjadi tragedi Bom Bali II, teror bom di Poso dan hal yang menimbulkan ketidaknyaman masyarakat dalam beraktivitas.

Ada hal yang sangat menggugah semangat pembelajaran **bela negara**, yaitu dengan makin menguatnya rasa nasionalisme kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air. Hal

ini dapat dilihat dari perjuangan dalam mengembalikan kondisi keamanan yang kondusif dan mampu mempertahankan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tetap tidak lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Meskipun dalam hal penetapan instrumen peraturan perundang-undangan bidang pertahanan tidak ada produk yang ditetapkan. Pada kenyataannya juga secara politis telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh dengan sangat demokratis, aman dan damai.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Budiono

Pada periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono – Budiono (2009-2014) mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera.
 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
- Misi : Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya *clean* dan *good corporate governance*.
3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk Kabinet, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada tanggal 18 Oktober 2011 mengadakan perombakan Kabinet yang mengakibatkan ada beberapa menteri yang direshuffle dan ada yang bergeser jabatan di dalam kabinet. Pada masa pemerintahan yang kedua ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono tampak kurang sigap dalam menangani berbagai masalah. Ada beberapa isu hangat membingungkan dan menimbulkan tanda Tanya. Misalnya: dari pemberantasan korupsi menimbulkan pertanyaan mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak

memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan. (*wartasejarah.blogspot.co.id*).

Ada 15 (lima belas) program prioritas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, yang disampaikan SBY se usai sidang Kabinet, sebagai berikut:

1. Pemberantasan mafia hukum
2. Revitalisasi industri pertahanan
3. Penanggulangan terorisme
4. Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia
5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan
6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula
7. Mengurai keruwetan agraria dan tata ruang
8. Membangun infrastruktur
9. Mengucurkan Rp. 100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil dan menengah
10. Mencari solusi pembiayaan dan investasi
11. Merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan
12. Reformasi kesehatan
13. Menyingkronkan antara pendidikan dan dunia kerja
14. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana
15. Sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutamakan musyawarah mufakat. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lamban. Meski begitu musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi sudah cukup berkembang dan mengalami kemajuan. Hasilnya di dalam negeri sangat terasa bahwa dengan demokrasi tercipta suasana yang dapat menghargai kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Di luar negeri adanya pengakuan bahwa Indonesia ditempatkan sebagai *free country* (negara bebas) di Asia, sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, India dan Taiwan.

Kondisi perekonomian sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Namun ekonomi Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis tersebut. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non migas Indonesia pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni 17 % dan masih berlanjut hingga Januari 2010. Salah

satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.

Sejalan dengan perjalanan demokrasi, maka sistem sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan kebebasan individualis, yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dari pada kepentingan bersama. Hal ini sangat kentara dengan kurangnya sosialisasi antara warga masyarakat, yang bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja tetapi juga sudah terjadi di wilayah pedesaan. Arus urbanisasi semakin meningkat, seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup yang makin konsumtif dan hidup di wilayah perkotaan lebih menjanjikan dibandingkan di desa untuk mendapatkan pekerjaan selain sektor pertanian.

Perjalanan demokrasi Indonesia pada satu sisi sudah mengalami kemajuan, namun pada sisi lain masih banyak yang belum siap secara mental dan ideologis. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang menekankan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila yang sangat berbeda pada masa orde baru yang sangat menekankan prinsip dari nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka kemajuan demokrasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang diimbangi dengan usaha-usaha filterisasi masuknya pengaruh global di segala bidang yang sangat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hasilnya sangat terasa dimana terjadi penurunan ketahanan mental ideologi bangsa, yang mengakibatkan terjadi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Nuansa euforia reformasi sangat kentara, masyarakat sudah hampir melupakan alat filterisasi nilai-nilai Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa sendiri. Seiring dengan keasyikan pemerintah dan masyarakat dalam menyambut dan mengisi era reformasi dengan demokrasi yang terbuka. Sehingga tanpa disadari pengaruh global di segala bidang terjadi. Dalam bidang ideologi terlihat nyata Pancasila sudah makin ditinggalkan, di bidang ekonomi menyusul ekonomi neo liberal dan etatisme yang makin jauh dari ekonomi koperasi, pada bidang sosial budaya terjadi pergeseran nilai-nilai yang makin individualis, masuk tidak terbandung budaya pergaulan bebas, seks bebas melalui media sosial, internet sampai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba makin bertambah. Oleh sebab itu, di akhir pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono meski terdapat beberapa kemajuan dalam bidang-bidang, seperti demokrasi, ekonomi dan

supremasi hukum namun banyak juga meninggalkan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kepada pemerintahan berikutnya.

Terkait dengan pembelajaran bela negara, terjadi pelemahan keteguhan dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang mempengaruhi moral dan mental bangsa. Hal ini akibat terjadi *kebablasan* dalam mengartikan demokrasi, dimana pemerintah asyik dengan permainan demokratisasinya sedangkan masyarakat bergembira ria menyambut kebebasan dalam segala bidang. Sehingga makna demokrasi dan reformasi itu sendiri hilang ditelan kesalahan persepsi masing-masing ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial yang konsisten dalam menggunakan norma dan nilai-nilai Pancasila.

Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)

Jokowidodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2014 setelah memenangkan pertarungan dengan lawannya Prabowo Subianto dan Hata Rajasa. Pemerintahan secara resmi mulai dilaksanakan setelah keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Kerja. Sama dengan pidato pertama Presiden Joko Widodo pada pelantikan kabinet, yang menyatakan ungkapan untuk kerja, kerja dan kerja.

Visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan (2014-2019) adalah “Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”

Menurut Joko Widodo-Jusuf Kalla, gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Adanya keyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam bekerja. Kedaulatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat secara bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan. Dilandasi kesadaran tinggi bahwa untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang maupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila dan TRISAKTI.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara

merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antarbangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang maju mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan berdayasaing menjadi kunci utama mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenai kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, pertimbangan maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integrasi dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mampu meningkatkan pendapatan dan pembagiannya secara adil, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak azasi dapat terpenuhi, terpelihara keamanan dan ketenteraman warga tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau

sebuah bangsa mengenai jati diri, masyarakat serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk mewujudkan visi nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong, ditempuh melalui misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Nawa Cita Agenda Prioritas Jokowi-JK. Ada 9 program prioritas dalam menjalankan visi dan misi pembangunan nasional yang diusung oleh Jokowi-JK yang nasional yang diusung oleh Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan nama Nawa Cita sebagai berikut:
 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
 2. Membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 (Sembilan) hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

(*nasional.kompas.com*)

Ada satu hal yang menarik untuk dikaji bahwa menurut analisis Jokowi-JK, kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan tindakan *redesign* dalam hal nasionalisme yaitu dengan memberikan suatu treatment revolusi karakter bangsa. Sehingga masyarakat Indonesia menemukan kembali sendi-sendi kehidupan dari nilai-nilai kebangsaan yang asli yang digali Pancasila. Mengingat nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan budi pekerti sudah banyak terkontaminasi pengaruh gegap gempitanya reformasi dan tatanan dunia maya yang kian mengglobal. Oleh sebab itu, menurut Franz Magnis Suseno (dalam *Kompasiana.com*) revolusi karakter bangsa yang lebih dikenal dengan nama revolusi mental tersebut harus dilakukan dengan perombakan sistem pendidikan nasional secara fundamental, total dan gradual. Pendidikan kewarganegaraan yang berisi pengetahuan bela negara dan moral bangsa harus dinomorsatukan sebagai episentrum perekayasaan kemanusiaan dalam gerak sentrifugal pencapaian tujuan kenegaraan, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Hal itu memang menjadi urgen mengingat hasil kajian tentang wawasan kebangsaan yang diterbitkan oleh media *online*

Republika (Republika.co.id.2015) terhadap 105 negara di dunia, diperoleh hasil yang sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena disebutkan bahwa Negara Indonesia berada diurutkan ke 96 dalam melaksanakan wawasan kebangsaannya. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan **membela negara**. Bahkan menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Riyacudu bahwa posisi **bela negara** masyarakat Indonesia berada diurutkan *buncit*.

Eksistensi posisi bela negara yang berada di urutan *buncit* diakibatkan adanya berbagai ancaman eskalasi gelombang globalisasi dunia yang telah benar-benar menjadi kenyataan. Bukan saja telah menembus batas-batas benteng normatif bangsa, tetapi telah sangat melemahkan tingkat ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOKEKSOSBUD). Misalkan pengaruh ideologi liberal, ekonomi pasar global, politik kepentingan manca negara, kontak sosial media dan dunia maya, serta adanya kebebasan dan reformasi yang *kebablasan* telah menjadi racun pembunuh kesadaran bela negara bangsa Indonesia.

Implementasi amanah reformasi masih banyak disalahgunakan, tidak konsisten dan tidak tepat mengenai sasaran pencapaian target. Keterbukaan diidentikan dengan kebebasan sebebaskan-bebasnya yang tidak terbatas dan anehnya dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, seperti tanpa dosa. Sesungguhnya faktor inilah yang sangat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap melemahnya tingkat ketangguhan ketahanan nasional. Semangat bela negara telah terkontaminasi oleh motivasi kebebasan individual, sehingga rentan menjadi tidak setia dan tidak patuh kepada negara.

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan otonomi daerah belum matang, masih dalam proses pembelajaran dan berpotensi banyak disalahkan digunakan. Masing-masing daerah otonom menginginkan pelaksanaan kekuasaan yang berlebihan (mutlak). Sehingga menciptakan pemerintahan yang salah kaprah, seperti timbul kembali daerah-daerah yang "dikuasai oleh raja-raja kecil laksana kerajaan zaman dulu". Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya potensi konflik wilayah yang menuntut otonomi luas yang dapat menjurus kepada disintegrasi, dan tentu sangat melemahkan wawasan kebangsaan.

Bercermin dari beberap ancaman, tantangan, situasi dan kondisi semangat bela negara tersebut, maka sangat perlu dilakukan revolusi mental seperti yang telah menjadi salah satu program **Nawa Cita**. Prioritas pembangunan karakter bangsa yang ditunjukkan untuk

menggambleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Bung karno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizar Riyacudu pada tahun 2015 telah mulai melaksanakan program nasional pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai Nawa Cita program prioritas pembangunan karakter bangsa yang dilaksanakan secara intensif dan komprehensif. Pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut dilaksanakan selama satu bulan sarasannya membentuk kader bela negara di kalangan masyarakat. Program ini banyak mendapat sorotan, sebab masih ada yang beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini adalah wajib militer. Padahal esensinya tidak begitu melainkan sama halnya dengan kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi dilakukan secara intensif dan komprehensif terhadap domain *knowledge*, *attitude* dan *skill* atau lazim disebut kognitif, afektif dan psikomotorik.

Domain kognitif diberikan pembelajaran pengetahuan teoritis bela negara yang akan memberikan pemahaman dan persamaan persepsi tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang kompetensi hak dan kewajiban bela negara. Afektif menyangkut pembelajaran penguatan sikap mental nasionalisme Indonesia, cinta tanah air dan berwawasan nasional. Psychomotor mencakup kemampuan awal bela negara yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh dan rela berkorban dalam melaksanakan bela negara.

3. Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sosiologis, bahwa keberadaan tatanan sosial kultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, secara nyata dapat mengajak mahasiswa dan pemuda untuk bela negara dan cinta tanah air Indonesia. Dalam konteks ini dinamika sosial selalu mengalami perkembangan, bahkan lebih cepat dibandingkan ilmu pengetahuan yang di ajarkan di dunia pendidikan. Sehingga sering membuat kita terkejut, sepertinya tiba-tiba sudah terjadi perubahan sosial, perubahan budaya yang bisa jadi sesuai atau tidak sesuai norma-norma yang ada.

Menyikapi perkembangan dinamika sosial dan perubahan sosial yang cepat, diperlukan aktivitas sosial yang dapat mengontrol dan mengadaptasi kejadian-kejadian yang memiliki dampak positif bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan, jika diajarkan dengan *style* implementatif, *iquiry* dan *problem solving* terhadap situasi dan kondisi aktual yang berkembang di masyarakat, maka tentu akan dapat membantu percepatan beradaptasi, namun tidak bertentangan dengan nilai, norma dan peraturan perundangan yang ada. Ini penting mengingat informasi sosial kultural yang hadir melalui media sosial, internet dan kontak sosial budaya tidak dapat dibendung transformasinya.

a. Kemampuan Adaptasi

Transformasi informasi pengetahuan dari belahan bumi luar Indonesia, kontak budaya, derasnya pesan-pesan di media sosial, gambar-gambar porno, prono aksi, kekerasan seksual, radikalisme, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, haker, infiltrasi paham komunisme, liberalisme, terorisme sampai dengan perang proxy (*proxy war*) telah terjadi dengan frekwensi yang sangat kuat. Bisa dikatakan hampir setiap detik terjadi dan sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Spektrum *proxy war* sudah sangat meluas pengaruhnya, bukan hanya disasar terhadap kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa dan pemuda tetap juga melanda orang dewasa. Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan doktrin bela negara yang tinggi, maka bukan saja dapat menghancurkan diri yang bersangkutan, tetapi juga mengancam integritas dan identitas bangsa.

Interaksi sosial yang terjadi baik secara langsung berhadapan muka (*face to face*) maupun melalui sosial media, dipastikan akan terjadi perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut pandangan, prinsip, kaidah dan perilaku yang diakibatkan oleh transformasi sosial. Kontrol sosial sangat diperlukan untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya perilaku menyimpang, tindakan diluar norma sosial dan agama. Penguatan istitusi sosial dengan cara mentransformasikan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, agama dan pancasila yang diaplikasikan dalam sikap dan tindakan, dimungkinkan dapat beradaptasi dengan benar, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif dan produktif namun tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tebal.

Kebutuhan akan pengetahuan, teknologi dan material menangani perubahan juga sesuai dengan perkembangan peradaban, kemajuan dunia. Tentu tidak boleh terjadi *culture laq* dan berhenti, sebab manusia selalu mudah mengalami perubahan. Apa lagi bila faktor lingkungan juga mendorong kuat untuk beradaptasi dengan hal baru, maka sudah dapat dipastikan akan mengadopsi dan mengakomodasi peristiwa-peristiwa sosial budaya yang terjadi. Peristiwa-persitiwa sosial dan budaya itu terjadi, seperti disajikan kepada setiap orang melalui kontak sosial dan sosial media. Ibarat seseorang yang sedang lapar, lalu disajikan hidangan makan dapat dipastikan akan menikmati makanan itu. Padahal mungkin, makanan

itu haram jika dimakan, atau mengandung bakteri yang bila dimakan dapat membuat tubuh menjadi sakit.

b. Mengisi Pembangunan

Ikhwal lain yang penting, membuat pembelajaran pendidikan kewarganegaran menjadi urgen bagi bangsa Indonesia adalah karena harus mengisi pembangunan bangsa dengan aktivitas positif dan produktif yang dilandasi moral bangsa, yaitu Pancasila dan kecintaan terhadap tanah air melalui bela negara sepanjang hayat. Mengisi pembangunan bangsa dengan tatanan sosial budaya, harus memiliki kemampuan dan sikap yang dapat mendorong terjadinya modernisasi yang beradab. Apalagi dalam era reformasi yang sangat demokratis, maka selayaknya di Indonesia untuk mengisi pembangunan tidak dengan aktivitas-aktivitas yang kontra produktif dan anarkis. Perilaku seperti itu harus dijauhkan dari kehidupan demokratis. Musyawarah dan mufakat yang telah menjadi landasan demokrasi di Indonesia harus dikedepankan agar apa yang diharapkan dalam tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

Mengisi pembangunan dengan rasa cinta tanah air, akan memberikan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Contoh cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Terlihat ekspresi yang muncul ada rasa kebanggaan kalau memakai hasil (*made in*) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan berasal dari impor negara luar.

Dalam hal kuliner nusantara, akan ada rasa senang dengan memakan makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negeri. Membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Coto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus beli ayam di *Kentucky*? Kenapa harus beli roti di *Mac Donal*? Padahal untuk beli ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

